BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang sering dilanda kekerasan, baik internal maupun eksternal. Konflik di Indonesia biasanya dikaitkan dengan kurangnya ketidakberpihakan dalam kebijakan pemerintah pusat dan implementasinya. Adanya konflik internal di Indonesia ialah seperti munculnya separatisme. Separatisme dipandang sebagai salah satu isu utama yang menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat Indonesia. Gerakan separatis ini dinilai dapat membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.[1]

Separatisme menurut definisi bahasa Indonesia adalah paham atau gerakan yang berusaha menciptakan negara untuk dirinya sendiri.[2] Separatis atau separatisme adalah tindakan seseorang dalam suatu kelompok besar atau masyarakat yang memisahkan diri dari atau meninggalkan kelompok tersebut dengan tujuan untuk berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka.[3] Separatisme adalah gerakan nasionalis yang berusaha memisahkan diri dari suatu negara untuk membentuk negara baru. Dan diperkirakan gerakan separatis ini memiliki sejarah panjang menentang pemerintah pusat, kelompok etnis, dan masalah agama.[4]

---

[1]Yogi Setya Permana, "Urgensi Sistem Pencegah Konflik Sosial Di Indonesia," n.d., http://www.politik.lipi.go.id.

[2]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," Balai Pustaka, 1998, https://kbbi.kemdikbud.go.id.

[3]Sefriani Sefriani, "Separatisme Dalam Perspektif Hukum Internasional: Studi Kasus Organisasi Papua Merdeka," *Unisia* 26, no. 47 (2003): 41, https://doi.org/10.20885/unisia.vol26.iss47.art5.

[4]Dewi Fortuna Anwar, *Konflik Kekerasan Internal: Tinjauan Sejarah Politik Dan Kebijakan Di Asia Pasifik* (jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 213.

Salah satu gerakan separatis di Indonesia yang menjadi perhatian penuh pemerintah Indonesia, salah satunya yaitu Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang berada di Aceh. Munculnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) disebabkan oleh adanya bentuk kekecewaan dan ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat Aceh atas kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia. Sehingga gerakan tersebut melakukan aksi protes dan serangkaian pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia. Seperti yang kita tahu, Aceh adalah salah satu daerah dengan sejarah masa lalu yang berbeda dari daerah lain. Aceh diyakini memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti minyak, batu bara, gas alam, tembaga, emas, hasil hutan, dan lahan besar yang cocok untuk pertanian dan perkebunan.

Aceh juga dikenal sebagai salah satu daerah yang sejak dulu diberikan otonomi khusus. Otonomi khusus Aceh berasal dari tanggung jawab pemerintah Nanggroe Aceh yakni diberi keleluasaan dalam menjalankan segala bidang kewenangan pemerintahan berdasarkan undang-undang dan memikul tanggung jawab sebagai konsekuensi kewajiban.[5] Karenanya, daerah Aceh diberi kewenangan khusus untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan pemerintahannya sendiri dan kepentingan penduduk setempat, sesuai dengan struktur dan prinsip negara Indonesia.

Selain itu, Aceh juga dikenal sebagai daerah yang diwarnai kerusuhan dan pertumpahan darah. Aceh dianggap telah melewati empat periode sejarah: zaman kerajaan Aceh, zaman penjajahan Belanda, zaman pendudukan Jepang, dan zaman kemerdekaan.[6] Orang-orang Aceh telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam perang kemerdekaan Indonesia, seperti yang mereka lakukan di bawah pendudukan Belanda dan Jepang. Kemudian wilayah aceh juga terkenal dengan

[5]Bisariyadi, "Skripsi Tinjauan Ketatanegaraan Penerapan Otonomi Khusus Pada Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam," 2003, 27.
[6]Wenseslaus Manggut M. Nugroho, "Aljumhuriyah Alindunisiah Di Simpang Jalan," *Koran Tempo*, 1999.

pemberontakan pertama di Aceh yakni Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang dipimpin oleh Tengku Daud Beure'euh juga patut dicatat karena pemberontakannya terhadap pemerintah Indonesia dari tahun 1953 hingga 1962, yang merupakan pemberontakan pertama di Aceh.

Pemberontakan ini terjadi atas dasar tuntutan janji kepada Presiden Soekarno untuk memberikan kebebasan kepada rakyat Aceh agar dapat menjalankan syariat Islam. Berangkat dari kekecewaan Aceh terhadap pemerintah akibat pemberontakan DI/TII, Hasan Tiro mendirikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Tetapi berbeda dengan Tengku Daud Beure'uh, Hasan Tiro, pendiri GAM, tidak menempatkan Islam sebagai tujuan utama, melainkan lebih memilih memisahkan diri dari Indonesia.[7] Gerakan Aceh Merdeka (GAM) muncul dari rasa ketidakadilan masyarakat Aceh kepada pemerintah, karena dirasa kurang menghormati dan memperhatikan pembagian alokasi sumber daya alam yang berhak dinikmati rakyat Aceh merupakan hak rakyat Aceh serta keinginan untuk menciptakan sistem politik Aceh yang berlandaskan ciri khas identitas budaya dan etno-religiusnya dengan menegakkan syariat Islam tidak terpenuhi. [8]

Sebagian masyarakat Aceh didasarkan pada kebijakan pemerintah pusat di bidang politik dan ekonomi, seperti halnya di bidang lain. Namun, beberapa masalah yang menimbulkan konflik di Aceh terutama terkait dengan Indonesia, khususnya proyek nasionalisme pasca kemerdekaan yang berpusat di Jakarta yang diyakini sebagian orang Aceh belum selesai. Elit politik Jakarta, di sisi lain, menganggap proyek nasionalis sudah selesai. Karena adanya disparitas persepsi tersebut, maka akan timbul konflik antara kedua kelompok kepentingan tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[7]Asteria Herbani, "Aceh Sebagai Operasi Militer," 1998, 1–3, http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-ln522cc87c61full.pdf.
[8]Kontras, *Aceh, Damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan Masa Lalu*, 2006, 18.

Mengingat proses menjadi Indonesia secara historis dinodai oleh politik Orde Baru yang keropos dan otorites .[9]

Gerakan Aceh Merdeka dan sebagaian para ulama melakukan sejumlah pemberontakan, di antaranya pergi ke kedai kopi, berdiri di atas meja, dan memberikan ceramah tentang Aceh Merdeka, membahas tentang kekayaan alam Aceh dan kemiskinan warga, dan mendorong rakyat Aceh untuk memberontak terhadap kebijakan pemerintah Indonesia yang seenaknya tanpa memikirkan masyarakat Aceh. Demikian juga dengan tindakan yang dilakukan oleh para ulama itu dimaksudkan agar wilayah Aceh tetap mempertahankan identitasnya.[10]

Keberadaan GAM saat awal pembentukannya masih dapat dikatakan lemah karena tidak sebanding dengan perlawanan pemerintah RI, maka dari itu pemerintah dapat melumpuhkan GAM dengan sangat mudah melalui pendekatan militer. Langkah GAM saat melakukan pemberontakan saat itu pun menjadi kesalahan yang besar karena di nilai memilih waktu yang kurang tepat yakni saat pemerintah Orde Baru berada dalam kondisi yang sangat stabil, baik dalam bidang politik, ekonomi bahkan dalam pembangunan. Hal ini tentu membuat GAM sulit untuk terus bergerak dan berkembang ditengah-tengah masyarakat.[11]

Kemudian perlawanan rakyat Aceh mulai meredup di tahun 1960-an, meski tidak pernah benar-benar musnah. Kalangan intelektual Aceh yang dipimpin oleh Hasan Tiro mendeklarasikan Gerakan Aceh Merdeka pada 4 Desember 1976. Gerakan Aceh Merdeka tersebut dibangun atas landasan ideologi nasionalis yang dibangun oleh Hasan Tiro yang ingin membebaskan rayat Aceh dari ketidakadilan pemerintah Indonesia. Berbeda dengan pemerintah pusat yang menganggap bahwa

[9]M. Nugroho, "Aljumhuriyah Alindunisiah Di Simpang Jalan."
[10]Bob Sugeng Hadiwinata, *Transformasi Gerakan Aceh Merdeka : Dari Kotak Peluru Ke Kotak Suara*, 2010, 59.\
[11] Eka Auliana Pratiwi, "Campur Tangan Asing Di Indonesia : Crisis Management Initiative Dalam Penyelesaian Konflik Aceh (2005-2012)," *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah* 2, no. 2 (2019): 86, https://doi.org/10.17509/historia.v2i2.15630.

GAM dipandang sebagai tindakan ilegal dan di labeli sebagai Gerakan pengacau Keamanan (GPK), karenanya, pemerintah pusat langsung menempuh pendekatan militer yang menetapkan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM).[12]

Sejak diberlakukannya Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh, terdapat banyak kekerasan yang terjadi, beberapa di antaranya seperti rakyat Aceh di gorok hingga lehernya putus, lalu kepalanya dibawa aparat keamanan dan dipertontonkan di hadapan rakyat Aceh, adapun rakyat Aceh di tembak di sumur, diganduli batu ke tubuh kemudian dibuang ke sungai, botol yang dimasukan ke kemaluan wanita, serta penyetruman alat vital, dan penyiksaan yang lainnya.[13] Wilayah Aceh selepas jatuhnya pemerintahan Soeharto tidaklah sama dengan Aceh 1989-1998, saat DOM berlaku. Dengan dimotori mahasiswa, masyarakat justru kian berani menuntut hak-hak mereka. Salah satunya yang menjadi bentuk perlawanannya yaitu melakukan kampanye referendum, guna menentukan apakah Aceh tetap berada dalam Republik Indonesia atau merdeka.[14]

Kemudian sejak diberlakukannya DOM di Aceh juga sangat memengaruhi kehidupan di bidang sosial, politik, ekonomi, dan kehidupan beragama masyarakat Aceh saat itu, dalam bidang sosial tentu sangat membawa kerugian besar bagi rakyat Aceh salah satunya dalam masalah kemanusian, rakyat Aceh hidup dalam keadaan tertekan, dipenuhi rasa ketakutan, runtuhnya nilai-nilai adat rakyat Aceh, dan hilangnya rasa kepercayaan rakyat Aceh terhadap orang asing. Lalu pengaruh dalam bidang politik salah satunya banyak menyebabkan rakyak Aceh mengungsi dan melakukan perjuangan ke luar negeri, rakyat aceh melakukan kontribusi

SUNAN GUNUNG DJATI

[12]Bambang Wahyudi, *RESOLUSI KONFIK UNTUK ACEH: Kiprah Masyarakat Aceh Non GAM Dalam Perdamaian Di Serambi Mekah Pasca MoU Helsinki*, 2013, 198.
[13]Al Chaidar, Sayed Mudhahar Ahmad, and Yarmen Dinamika, "Aceh Bersimbah Darah," 1999, 98.
[14]telni rusmita Masnyur Alkatiri, mimin rukmini, ali anwar, "Operasi ' DOM Wibawa' Di Serambi Mekah," *Koran Nasional*, 1999, 33.

terhadap konflik yang terjadi dengan melakukan pencarian dana dan menyebarkan informasi dalam mengenai ideologi GAM.[15]

Dalam bidang ekonomi dampak perekonomian di Aceh masih mengalami stagnasi, hal ini membuat kehidupan rakyat Aceh mengalami penurunan yang cukup drastis dalam hal ekonomi. Adanya ketidakadilan, ketimpangan ekonomi, dan kemiskinan. Wilayah Aceh yang kaya akan sumber daya alam, tetapi masyarakat Aceh tidak terlibat dalam perencanaan, pengolahan, atau distribusi hasil dari sumber daya tersebut.[16] Begitu juga dengan kehidupan beragama masyarakat Aceh saat itu, menggambarkan bahwa wilayah Aceh dan penduduknya disebut sebagai masyarakat yang sangat kental dengan keyakinan agama Islam. Di sinilah GAM menggunakan agama sebagai sarana untuk mewujudkan keinginan masyarakat Aceh dengan mengajarkan nilai-nilai agama, serta mengajak masyarakat Aceh untuk mengunjungi masjid untuk mendengarkan ceramah tentang sejarah kejayaan Aceh pada masa kejayaan Kerajaan Aceh.[17]

GAM diklaim telah melalui tiga fase besar dalam perkembangannya, yang pertama dari tahun 1976 hingga 1989. GAM adalah organisasi kecil yang dipimpin oleh orang-orang terpelajar dan merupakan gerakan bawah tanah. Aceh terintegrasi dengan Daerah Operasi Militer pada tahap kedua (1989-1998). Fase ketiga, yang berlangsung dari tahun 1998 hingga 2003, pemerintah pusat terus menggunakan kekerasan terhadap GAM, namun rasa nasionalisme Aceh mulai meningkat di masyarakat Aceh.[18] Keberadaan Gerakan Aceh Merdeka diklaim sebagai potret kabur dari banyak ketidakadilan dan kejahatan HAM yang terjadi

[15] Eriyen Hertiana & Kian Amboro, Pengaruh Konflik GAM-RI di Bidang Politik Sosial terhadap kehidupan masyarakat Aceh Tahun 1976-2012, Universitas Muhammadiyah Metro, 2012. pp. 45-47
[16] Asteria Herbani, 'Aceh Sebagai Operasi Militer', 1998, pp. 60
[17] Reni Kumalasari, "Relasi Agama Dan Konflik Di Aceh Pasca Konflik; Pemerintah Indonesia-Gerakan Aceh Merdeka," *Jurnal Adabiya* 23, no. 1 (2021): 8, https://doi.org/10.22373/adabiya.v23i1.7592.
[18] Kurnia Jayanti, "Konflik Vertikal Antara Gerakan Aceh Merdeka Di Aceh Dengan Pemerintahan Pusatdi Jakarta Tahun 1976-2005," *International Institute for Environment and Development* 07/80, no. 2 (2010): 17.

sepanjang sejarah Indonesia. Berbagai tindak kekerasan yang mengatasnamakan berbagai operasi dan misi dari berbagai kelompok yang memperebutkan berbagai hal dalam hal politik, bisnis, budaya, dan kebangsaan, yang kesemuanya itu dapat dicapai terutama melalui perdamaian/persaudaraan.

Berdasarkan latar belakang diatas, alasan penulis tertarik dalam pengkajian ini yaitu ingin mengetahui lebih jauh apa yang mendorong terjadinya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) serta mengetahui bagaimana penyelesaikan konflik Gerakan Aceh Merdeka, dengan judul penelitian "**Separatisme: Mengungkap Gerakan Aceh Merdeka serta dampak daerah operasi Militer di Aceh tahun 1976-2005** "

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul serta latar belakang diatas, maka dapat ditarik permasalahan guna memfokuskan orientasi penelitian, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sejarah Gerakan Aceh Merdeka serta proses terjadinya Daerah Operasi Militer ?
2. Bagaimana dampak kondisi sosial, politik, ekonomi, dan kehidupan beragama, Aceh sejak diberlakukan Daerah Operasi Militer dan Daerah Otonomi Khusus ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui sejarah Gerakan Aceh Merdeka serta proses terjadinya Daerah Operasi Militer
2. Mengetahui dampak kondisi sosial, politik, ekonomi, dan kehidupan beragama Aceh sejak diberlakukan Daerah Operasi Militer dan Daerah Otonomi Khusus

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

D. Kajian Pustaka

Setelah mencari sumber, penulis telah mengumpulkan berbagai publikasi ilmiah yang memuat informasi tentang Gerakan Aceh Merdeka, setidaknya sampai saat ini. Meskipun penulis dapat menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah yang pertama mengkaji Gerakan Aceh Merdeka, namun terdapat bahan pustaka lain tentang hal tersebut, termasuk ensiklopedia, buku, tesis, dan disertasi. Pencarian penulis ini dilakukan untuk mencegah perilaku tidak etis dalam ranah akademik. Rencana studi ini dibuat berdasarkan karya-karya sebelumnya yang penulis gunakan sebagai acuan dalam menyusunnya, seperti:

Buku Kontras yang berjudul Aceh Damai Dengan Keadilan?Mengungkap Kekerasan Masa Lalu (2006). Buku ini berisi mengenai laporan kekerasaan dan pelanggaran HAM atas kebijakan yang dilakukan Pemerintah Indonesia sejak diberlakukannya status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh.

Buku Al-Chaidar yang berjudul *Aceh Bersimbah Darah:mengungkap penarapan status DOM di Aceh 1989-1998*. Dalam buku nya dibahas mengenai penerapan status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh tahun 1989-1998, dan bagaimana berbagai contoh pelanggaran HAM yang berdampak negatif bagi Aceh.

Buku karya Bob Sugeng Hadiwinata dkk yang berjudul *Transformasi Gerakan Aceh Merdeka, dari kotak peluru ke kotak suara* (2010). Dalam buku dibahas mengenai proses tranformasi pejuang GAM dari berbagai perspektif, serta sejarah maupun seluk beluk perdamaian Aceh. Dalam bukunya Bob Sugen Hadiwinata, mengatakan bahwa ketika hubungan internasional pertama kali muncul pada akhir abad ke-19, mereka cenderung berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan perang dan perdamaian. Perkembangan selanjutnya dalam hubungan internasional meliputi kerjasama ekonomi antar negara, upaya pengentasan kemiskinan dunia, pemahaman tentang ketimpangan dalam hubungan

antara kelompok negara kaya dan miskin, dan pemahaman tentang kejahatan lintas batas, serta untuk mengatasi konflik separatisme dan sebagainya.

Buku karya Bambang Wahyudi yang berjudul *Resolusi Konflik untuk Aceh* (2013). Dalam buku ini memuat tentang cakupan resolusi konflik lebih luas dibanding akhir konflik antara pejuang GAM dan pemerintah RI. Dalam buku ini juga dibahas tentang penyelesaian seluruh konflik yang masih membutuhkan peran dan waktu rakyat Aceh.

Buku karya Hasan Saleh dengan judul *Mengapa Aceh Bergejolak* (1992). Buku ini menjelaskan bagaimana kolonialisme pertama kali tiba di Aceh, serta kesepakatan yang ditandatangani oleh penguasa kolonial dengan rakyat Aceh. Sebuah kutipan dalam buku ini mengatakan, "Berjuang untuk kepentingan bangsa dan berjuang untuk kepentingan daerah

Penelitian Asteria Herbani yang berjudul *Aceh sebagai Daerah Operasi Militer 1989-1998 (2014),* yang membahas tentang cakupan peristiwa saat Aceh dijadikan Daerah Operasi Militer (DOM) pada tahun 1989-1998, serta menggambarkan bagaimana situasi dan kondisi Aceh dari segi sosial, politik, maupun ekonomi sebelum terjadi DOM, hingga diterapkannya status DOM dan pencabutan status DOM. Lebih jauh pada skripsi ini dijelaskan bahwa DOM telah diterapkan di Aceh sejak tahun 1989, dijelaskan bahwa peristiwa ini jauh lebih kejam daripada yang pernah disaksikan dalam sejarah Asia Tenggara.

E. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metodologi sejarah seperti heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi untuk menyelesaikan penelitian ini. Diharapkan bahwa hasil studi yang berkualitas dapat diperoleh dengan menggunakan strategi ini. Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan pendekatan. Prosedurnya diuraikan di bawah ini.;

Setelah melakukan berbagai proses penelitian dan menggunakan beberapa pendekatan, penulis akan menggabungkan hasil dari berbagai penelitian di lapangan. Penulisan yang metodis diperlukan untuk mempermudah penulisan.

1. Heuristik

Langkah pertama penulis dalam penelitian ini adalah mengembangkan heuristik. Tahap ini menggambarkan bagaimana penulis mendapatkan, menemukan, dan mengumpulkan sumber dengan mengkategorikannya.[19] Heuristik adalah tindakan yang memperoleh data historis, material, atau bukti dari berbagai sumber. Informasi yang penulis peroleh berasal dari sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang mereka selidiki, yang akan dianalisis dan diubah menjadi fakta untuk direkonstruksi pada tahap selanjutnya. Menggunakan sumber tertulis, sumber lisan, dan sumber hal-hal yang berhubungan dengan judul penelitian untuk menelusuri sumber yang akan digunakan dalam penelitian.[20]

Penulis dalam situasi ini mengandalkan studi literatur atau warisan. Buku-buku, jurnal-jurnal terhormat dari internet, dan berbagai perpustakaan digunakan sebagai sumber. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Perpustakaan Batu Api adalah dua di antaranya. Selain itu, penulis membagi sumber menjadi dua kategori: primer dan sekunder, yang diuraikan di bawah ini:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber yang diperoleh dari pelaku sejarah atau kesaksian dari saksi yang mengalami peristiwa sejarah dengan mata kepala sendiri, serta sumber yang diperoleh dari sezaman dengan peristiwa yang diperoleh. Beberapa sumber utama ditemukan selama penyelidikan ini.[21]

1. *Tragedi Lhokseumawe, dan Referendum*. Koran Tempo 25 Januari 1999.

---

[19] Heulius Sjamsuddin, Metodologi Sejarah (Yogyakarta:Ombak, 2007),hlm.96

[20]Sulasman, *Metode Penelitian Sejarah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 93.

[21] Gottchalk, Loius. Mengerti Sejarah, (Jakarta:Universitas Indonesia (U-I Press) 1985), cetakan keempat, hlm.35

2. *Operasi " DOM Wibawa" di Serambi Mekah*. Koran Ummat, 1 Maret 1999
3. *Aljumhuriyah Alindunisiah di Simpang Jalan*. Koran Tempo, 21 November 1999
4. *Syariat Islam itu terkesan Setengah Hati*. Koran Kompas, 13 Desember 2004
5. *Pemberlakuan DOM di Aceh*. Koran Tempo, 21 November 1999

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang dikumpulkan dari pembuktian seseorang yang tidak melihat secara langsung peristiwa sejarah atau hidup pada saat peristiwa itu terjadi.[22] Sumber data sekunder dalam hal ini dapat berupa literatur pendukung, serta berbagai makalah, buku, jurnal, atau artikel tentang Gerakan Aceh Merdeka.

1. Al-Chaidar, 1999 Aceh Bersimbah Darah 1989-1998
2. KontrasS, Aceh Damai Dengan Keadilan?Mengungkap Kekerasan Masa Lalu, 2006.
3. Bob Sugeng Hadiwinata dkk, 2010 Transformasi Gerakan Aceh Merdeka, dari kotak peluru ke kotak suara
4. Bambang Wahyudi, 2013 Resolusi Konflik untuk Aceh
5. Asteria Herbani, 2014 Aceh sebagai Daerah Operasi Militer 1989-1998
6. Nasruddin, 2014 Pengaruh Konflik GAM-RI terhadap kehidupan beragama, sosial, dan politik rakyat Aceh 1976-2005
7. Gade, Fakhrurradzie, 2012 Rekam Jejak Demokrasi Aceh.
8. Hasan Saleh, 1992 Mengapa Aceh Bergejolak
9. Dewi Fortuna Anwar. 2004 Konflik Kekerasan Internal: Tinjauan Sejarah Politik Dan Kebijakan Di Asia Pasifik

[22] Gottchalk, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1985).

2. Kritik

Tahap kedua dari metode sejarah adalah tindakan memanfaatkan sumber-sumber yang telah dikumpulkan untuk menentukan legitimasinya dan menganalisisnya. Tahap ini dipisahkan menjadi dua bagian: kritik eksternal, yang berkaitan dengan keaslian atau keaslian, dan kritik internal, yang berkaitan dengan kritik sumber.

a. Kritik Eksternal

Kritik eksternal digunakan untuk memeriksa keaslian sumber dalam bentuk dengan melihat kertas atau bahan, tanggal, dan tanda-tanda dalam teks.[23] Setiap sumber pertama-tama harus diakui otentik dan integral karena berbagai alasan atau situasi. Penulis harus dianggap sebagai pribadi yang dapat dipercaya (credible).[24]

a) Kritik eksternal dari buku yang berjudul Aceh Damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan Masa Lalu, ialah buku yang diterbitkan oleh Kontras pada tahun 2006. Dilihat dari cover terlihat masih bagus, setiap halaman lengkap, dan tulisannya dapat dibaca dengan jelas.

b) Kritik eksternal dari buku yang berjudul yang berjudul *Aceh Bersimbah Darah, Mengungkap Penerapan Status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh 1989-1998,* ialah buku karya Al-Chaidar. Merupakan cetakan ke lima yang terbit pada tahun 1998, diperoleh dari internet yaitu google Books, setiap halaman lengkap, tulisannya dapat dibaca dengan jelas,dan bahasa nya mudah dipahami.

c) Kritik eksternal dari buku yang berjudul *Transformasi Gerakan Aceh Merdeka, dari kotak peluru ke kotak suara*, ialah buku karya Bob Sugeng Hadiwinata, dkk. Terbit pada tahun 2010, buku ini diperoleh dari internet

[23]Kuntowijoyo, *Penjelasan Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), 77.
[24] Hasan Usman, Metode Penelitian Sejarah (Jakarta:Departemen Agama, 1986),hlm.84

yaitu google Books, bagian buku memiliki setiap halaman yang lengkap, dan jelas.

d) Kritik eksternal dari buku yang berjudul *Resolusi Konflik untuk Aceh* ialah buku karya Bambang Wahyudi yang terbit pada tahun 2013, buku ini diperoleh dari internet yakni google Books. Buku ini memiliki setiap halaman yang lengkap, dapat dibaca dengan jelas dan dapat dipahami.

b. Kritik Internal

Kritik internal adalah metode untuk menguji sumber. Tiga hal terjadi selama kritik internal. Pertama-tama, memiliki penilaian intrinsik, yang berkaitan dengan apakah seorang sumber kompeten atau tidak, berpengetahuan luas, dan dekat dengan sumber atau saksi. Kedua, baik dengan kemauan sumber untuk menyediakan maupun keinginan sumber untuk membuktikan dan menyampaikan[25]

a) Kritik Internal dari buku *Aceh Bersimbah Darah, Mengungkap Penerapan Status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh 1989-1998*, ialah buku hasil karya Al-Chaidar dkk, buku ini merupakan buku cetakan ke lima pada tahun 1998 yang diterbitkan oleh Pustaka Al Kautsar, Buku Islam Utama Jakarta. Dilihat dari segi isinya memuat mengenai cerita tragis di Aceh akibat diberlakukannya status Daerah Operasi Militer (DOM). Disini penulis menguraikan sejarah pembatantaian sejak masa penjajahan Belanda sampai masa orde baru.

b) Kritik Internal dari buku *Revolusi Konflik untuk Aceh*, merupakan buku cetakan pertama yang ditebitkan oleh Makmur Cahaya Ilmu pada tahun 2013 di Jakarta. Dalam buku ini memuat

c) Kritik Internal dari buku *Aceh Damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan Masa Lalu*, merupakan buku yang diterbitkan oleh Kontras pada tahun 2006. Isi buku ini memuat laporan peristiwa terkait segala

[25]Gottchalk, *Mengerti Sejarah*, 80.

bentuk kekerasan beserta beberapa pelanggaran HAM yang terjadi pada masa penetapan status Daerah Operasi Militer (DOM) wilayah Aceh .

F. Interpretasi

Interpretasi yakni penafsiran data atau yang dikenal dengan sejarah, yaitu catatan atau jumlah yang telah diperoleh, itulah yang dimaknai. Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara pada saat ini: sintesis dan analisis. Karena pendapat atau fakta sejarah penulis dimasukkan dalam proses interpretasi, maka sering disebut sebagai sumber subjektivitas. Data ini kemudian disatukan menjadi urutan kejadian yang mulus. Subjektivitas diakui dalam sejarah, tetapi harus dihindari.[26]

Pada tahap interpretasi ini penulis melakukan analisa sejarah dengan menggunakan teori Anatomi Revolusi yang digagas oleh Crane Brinton, menurutnya revolusi terjadi karena digerakkan oleh orang maupun sekelompok orang yang mempunyai ketertarikan (*interest*) yang sama. Brinton juga menyatakan bahwa revolusi merupakan sebuah peristiwa perubahan yang terjadi pada skala yang besar dalam waktu yang singkat, yang mana perubahan nya meliputi aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya.[27]

Dalam penelitian kali ini yang menjadi obyek kajian adalah munculnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang disebabkan karena adanya kekecewaan maupun ketidakadilan yang dirasa masyarakat Aceh termasuk dalam segi sosial, politik, ekonomi yang dilakukan pemerintah Indonesia.

---

[26]Kuntowijoyo, "Pengantar Ilmu Sejarah," *Jurnal Ilmu Sejarah*, 2013, 78.
[27]Sulasman, *Metode Penelitian Sejarah*, 219.

G. Historiografi

Proses pengumpulan sejarah dan berbagai sumber dalam bentuk tulisan sejarah disebut dengan historiografi. Penulis harus mempertimbangkan struktur dan gaya bahasa tulisan setelah melengkapi fakta-fakta yang ada. Penulis harus menyadari hal ini dan melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa konsep-konsep utama yang diberikan dipahami oleh orang lain.[28]

Dalam tahapan historiografi ini penulis membagi ke dalam beberapa bab diantaranya yaitu :

BAB pertama meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, dan metodologi Penelitian yang berisi heuristik, kritik, interprestasi dan historiografi.

BAB kedua, membahas tentang apa yang melatarbelakangi munculnya Gerakan Aceh Merdeka berserta dampak diberlakukannya Daerah Operasi Milter di Aceh.

BAB ketiga, membahas tentang bagaimana kondisi sosial, politik, ekonomi sejak diberlakukannya Daerah Operasi Militerberikut dicabutnya status Daerah Operasi militer dan Aceh dijadikan sebagai Daerah Otonomi Khusus.

BAB keempat, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan beberapa saran atau rekomendasi yang penulis sampaikan kepada pembaca.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[28]Sulasman, 147.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG